

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kosakata dan tata bahasa memengaruhi sebuah teks atau wacana dalam menyampaikan ideologinya dan kaitannya dengan marjinalisasi ideologi lain. Salah satu cara penulis menyampaikan ideologinya adalah dengan menggunakan kosakata dan tata bahasa tertentu dalam teksnya. Melalui teks tersebut, penulis dapat menyampaikan wacana sesuai dengan ideologi yang dianut. Wacana sebagai suatu ide dan pikiran pada suatu masyarakat dapat menjadi suatu sumber informasi bagi tingkah laku masyarakat terkait. Di dalam ruang publik, salah satunya media sosial, wacana juga berperan dalam membentuk bagaimana suatu kelompok dapat mendiskriminasi atau memarjinalisasi kelompok lain.



Gambar 1. Berita CNN mengenai Kejaksaan Agung yang menolak pelamar CPNS LGBT  
(Sumber: Situs Berita CNN Indonesia)

Salah satu peristiwa yang sempat membuat ramai adalah pernyataan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menyatakan secara terbuka bahwa mereka melarang orang-orang dari kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/seksual) untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikan oleh Mukri selaku Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Di mana Ia menyampaikan bahwa, “Kita kan pengen yang normal, yang wajar-wajar saja. Kita tidak mau yang aneh-aneh.”<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh akun Twitter @Gerindra, yang mana mereka menunjukkan sikap ketidaksetujuan terhadap pernyataan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penolakan pelamar CPNS yang memiliki orientasi seksual berbeda atau kelompok LGBT. Hal tersebut tentunya mengundang beberapa respon yang bertentangan karena di laman resmi

---

<sup>1</sup> Adhi Wicaksono, *Kejaksaan Agung Tolak Pelamar CPNS LGBT*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121163515-20-450375/kejaksaan-agung-tolak-pelamar-cpns-lgbt>, pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 00.31 WIB.

<https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/> tidak dijelaskan secara detail persyaratan CPNS yang membahas pendaftar dengan orientasi seksual berbeda. Partai Gerindra, selaku pihak yang merespon pernyataan tersebut, menyampaikan 5 *tweet* yang saling berhubungan kepada Kejaksaan Agung RI pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB. Detil kelima *tweet* tersebut adalah:

1. Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra  
16.34 – 28 November 2019 (1.8K *replies*, 734 *retweets*, 1.6K *likes*)
2. Kaum LGBT tetap berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga Negara. Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. #SuaraGerindra @KejaksaanRI  
16.36 – 28 November 2019 (101 *replies*, 99 *retweets*, 224 *likes*)
3. Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagai CPNS oleh @KejaksaanRI sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. #SuaraGerindra  
16.40 – 28 November 2019 (133 *replies*, 57 *retweets*, 79 *likes*)
4. Semua warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Ada pun kewajiban dasar LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai dan norma Pancasila #SuaraGerindra @KejaksaanRI  
16.41 – 28 November 2019 (16 *replies*, 45 *retweets*, 49 *likes*)
5. @KejaksaanRI sebagai salah satu lembaga hukum seharusnya sangat memahami dasar hukum terhadap masalah penolakan LGBT menjadi CPNS ini. #SuaraGerindra  
16.44 – 28 November 2019 (9 *replies*, 35 *retweets*, 48 *likes*)



Gambar 2. Pernyataan Partai Gerindra  
(Sumber: Akun Twitter resmi Partai Gerindra)

*Tweet* ketidaksetujuan partai Gerindra terhadap Kejaksaan Agung menuai banyak pro dan kontra dari pengguna Twitter lain. Tanggapan yang diterima oleh Partai Gerindra dilatarbelakangi oleh citra mereka sebagai partai yang cenderung konservatif. Rekam jejak aktivitas mereka di masa

lampau seperti keterlibatan Partai Gerindra dengan PA (Presidium Alumni) 212 dan hubungan Prabowo Subianto dengan pemimpin FPI (Front Pembela Islam) Rizieq Shihab menjadi bukti yang menunjukkan kecenderungan sikap konservatif mereka. Jika dilihat dari sejarahnya, Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang dikenal sebagai Gerindra merupakan partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto, Fadli Zon, Hashim Djojohadikusumo, Suhardi, dan Muchdi Purwoprandjono pada tanggal 6 Februari 2008 dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umum dan ketua dewan pembinanya Meskipun merupakan partai yang relatif baru, Partai Gerindra selalu mengantarkan Prabowo Subianto untuk mewakili ajang kontestasi pemilihan presiden di dua periode terakhir ini, yaitu periode 2014 dan 2019 di mana terdapat sentimen agama pada tahun 2019. Melihat latar belakang yang seperti itu, sangat mengejutkan apabila akun Twitter @Gerindra secara tiba-tiba *mention* akun Twitter @KejaksaanRI dan mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap persyaratannya bahwa pelamar CPNS dilarang dari kelompok LGBT.

Namun tepatnya sejak pukul 05.00 – 05.15 WIB setelah 5 *tweet* ketidaksetujuan Partai Gerindra terhadap pernyataan Kejaksaan Agung RI, terdapat 1.752 cuitan menggunakan tagar #ShameOnYouGerindra, yang membuat topik itu ada di posisi kedua tren Twitter<sup>2</sup>. Hingga tanggal 29 November 2019 pukul 09.55, terlihat bahwa *tweet* yang pertama sempat mendapatkan respon sebanyak kurang lebih 1800 komentar atau *replies*, 746 *retweet*, dan 1700-an *like*. Sedangkan empat *tweet* berhubungan lainnya tidak mendapatkan respon sebanyak yang pertama. Di balik ramainya respon tersebut, terdapat cukup banyak kecaman dan ancaman untuk *unfollow* akun @Gerindra. Meskipun demikian, di tanggal yang sama dengan cuitan kontroversi tersebut diunggah, akun yang memiliki jumlah *follower* sebanyak kurang lebih 543 ribu pada saat itu tidak kehilangan sedikitpun jumlah *follower* melainkan mengalami penambahan *follower* sebanyak 179 akun. Namun pada tanggal 29 November 2019, mereka kehilangan *follower* sebanyak 142 akun. Sedangkan sampai pada tulisan ini dibuat, 1 Desember 2019, *follower* akun @Gerindra masih terus bertambah setiap harinya.

---

<sup>2</sup> Republika, *Tweet-nya Dinilai Dukung LGBT, Warganet Serang Akun Gerindra*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q1pn7g5917000/tweetnya-dinilai-dukung-lgbt-warganet-serang-akun-gerindra>, pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 13.20 WIB.

2019-11-27	Wed	+208	533,884	–	3,943	+33	92,164
2019-11-28	Thu	+179	534,063	–	3,943	+65	92,229
2019-11-29	Fri	-142	533,921	-3	3,940	+76	92,305
2019-11-30	Sat	+166	534,087	–	3,940	+33	92,338
2019-12-01	Sun	+186	534,273	+1	3,941	–	92,338

Gambar 3. Statistik akun Twitter @Gerindra  
(Sumber: <https://socialblade.com/twitter/user/gerindra>)

Melihat respon ketidaksetujuan partai Gerindra menuai cukup banyak respon, admin akun Twitter @Gerindra dengan aktif membalas beberapa komentar yang mayoritas berpendapat tidak setuju dan cenderung menyudutkan. Namun sangat disayangkan ketika dicek kembali pada sore hari tanggal 30 November 2019, kelima *tweet* pertama mereka telah dihapus oleh admin akun Twitter @Gerindra.

Salah satu respon kontra terhadap *tweet* akun Gerindra lainnya disampaikan oleh Chak Khum dengan akun Twitter @ChakKum selaku tim sukses Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dan simpatisan Partai Gerindra pada tahun 2018. Ia mengungkapkan kecamannya secara tegas dan mengatakan dalam beberapa *tweet*, salah satunya adalah bahwa,

“LGBT itu penyakit, penyakit yang bisa menular, tidak anda dukung haknya saja luar biasa pesat perkembangannya apalagi anda dukung haknya. Semakin mendapat pengakuan akan haknya maka perkembangannya akan semakin pesat karena eksistensinya mulai diakui, anda sehat min @Gerindra?”

Tidak hanya melalui *tweet* tersebut, gambar potongan-potongan surat *Al-A'raf* ayat 82 dan surat *Asy-Syu'araa* ayat 167 pun turut menyertai. Pernyataan @CakKhum tersebut pun mampu mendapatkan 50 komentar, 405 *retweet*, dan 944 *like*, dari total 132.803 *follower*, yang menandakan cukup banyak orang yang setuju dengannya. Melanjutkan *tweet* tersebut, ia mengutarakan lagi ketidaksetujuannya dengan mencantumkan gambar potongan surat *Huud* ayat 78 dan surat *Al-Qamar* ayat 37 meski hanya mendapatkan 1 balasan, 54 *retweet*, dan 114 *like*, yaitu:

“Cara yg sama dipakai oleh kaum *gay*. Menjeriti kezaliman saat mrk sedikit. Saat mrk banyak? Mrk menyiksa, mengancam, bahkan memperkosa kaum laki<sup>2</sup>. Alquran telah bercerita tentang mrk. Mereka usir orang<sup>2</sup> yg menentang mereka. Mereka sebut yg mengingatkan mereka sbg org<sup>2</sup> “sok suci””

Akan tetapi tidak semua pengguna Twitter memberikan respon yang kontra terhadap *tweet* partai Gerindra. Tidak seperti beberapa pendukung Partai Gerindra yang menunjukkan kekecewaan dan

kecaman, terdapat juga beberapa pengguna Twitter yang turut memberikan dukungan, seperti Rahan Galileo dengan akun @glrhn dan Kate Walton. Sebagai seorang *selebtweet* atau seorang *influencer* di Twitter, Rahan Galileo memiliki pengikut sebanyak kurang lebih 41.500 akun. Ia mengungkapkan dukungannya atas pernyataan @Gerindra dengan mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan akun @Gerindra merupakan sesuatu yang baru dan progresif mengingat bahwa mayoritas konstituen Partai Gerindra merupakan orang-orang yang menolak dan bahkan mendukung diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Dari komentar tersebut, Ia mendapatkan 40 balasan, 337 *retweet*, dan disukai oleh 475 akun Twitter.



Gambar 4. Salah satu dukungan terhadap Partai Gerindra  
(Sumber: Akun Twitter Rahan Galileo)

Selanjutnya adalah Kate Walton, seorang penulis dan aktivis feminis yang sering mengangkat isu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Kate memberitahukan kepada kurang lebih 23 ribu pengikutnya bahwa ia menyukai apa yang disampaikan oleh @Gerindra, meskipun ia merasa heran dengan keanehan yang jarang sekali terjadi ini, apalagi dari sebuah partai politik. Kemudian, di dalam utas lanjutannya, ia menjelaskan kebingungannya akan sikap dan *tweet* @Gerindra yang semakin ambigu.

Pembahasan mengenai LGBT merupakan hal yang tabu apalagi dalam ranah politik dan pemerintahan. Pemerintah dan pejabat publik terus menerus memojokkan kelompok tersebut dengan hanya menyorot sisi-sisi negatifnya saja, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh seorang *gay*, pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain, dan masih banyak hal negatif yang disorot dan diberitakan. Selain itu, pembicaraan mengenai LGBT di

dalam ranah politik juga hanya dijadikan olokan, tuduhan, dan kambing hitam. Contohnya adalah yang dilakukan ketika tahun politik 2019 antara calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Pembahasan mengenai LGBT dimanfaatkan pendukung kedua belah pihak untuk menyerang pihak lainnya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih terdapat marginalisasi terhadap kelompok LGBT di Indonesia dan dapat dilakukan di ruang publik, termasuk Twitter. Mies Grijn (dalam Putri, 2015:8) mengungkapkan marginalisasi merupakan suatu bentuk proses yang mengubah hubungan manusia yang menunjukkan bahwa sekelompok orang akan semakin tidak dapat mengakses sumber daya seperti air, tanah, pekerjaan, pendidikan, modal, dan hak-hak politik karena dimonopoli oleh beberapa pihak tertentu yang berkuasa. Konsep marginalisasi dalam penelitian ini berfokus pada posisi kelompok LGBT yang semakin teralienasi dalam segala aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam ajang pemilihan umum tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Grijn, konsep marginalisasi yang semakin dimonopoli oleh elit tertentu ini terjadi juga pada pemilu 2019 lalu. Kedua pendukung ekstrim calon presiden dan wakil presiden saling serang mengenai keberpihakannya terhadap kelompok LGBT. Walaupun tidak langsung diucapkan oleh calon masing-masing, namun pendukung kedua pihak tidak pernah berhenti membicarakan isu ini. Beberapa contoh isu-isu yang pernah dibicarakan tentang LGBT dalam kaitannya dengan pasangan calon adalah logo paslon 01 yang warnanya dikatakan mirip dengan warna logo LGBT, anak dari salah satu paslon 02 yang disebut *gay*, tingkah laku salah satu dari paslon 02 yang dikatakan mirip *gay*, rumor bahwa paslon 01 akan melegalkan pernikahan sejenis apabila menang, dan masih banyak lagi.

Salah satu contoh jelasnya adalah Faizal Assegaf yang merupakan seorang simpatisan pasangan calon Joko Widodo – Ma'ruf Amin, yang mana ia sering menggunakan kata “homo” sebagai makian dan hinaan terhadap tim BPN (Badan Pemenangan Nasional) hingga Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Salah satu contoh *tweet*-nya adalah:

“Ketika saya buka kedok para homo seperti @rockygerung, @MardaniAliSera, @sandiuno, @Fahrihamzah, @saididu, @fadlizon, tak satupun berani membantah. Knp? Alasannya sederhana, video ttg lakon mrk berperilaku homo sdh saya kantong. Ingat, jgn sekali-kali berfilsafat dgn liar!\*FA\*”

Pernyataan tersebut mengundang 808 *retweets*, 2.665 *likes*, dan 1.102 *replies*. Hal seperti ini kerap sekali ia utarakan sebagai kampanye hitam terhadap pasangan calon tersebut ketika masa kampanye kemarin dan menjadi bagian dari marginalisasi kelompok LGBT.

Selain simpatisan Joko Widodo - Ma'ruf Amin yang menyerang lawannya, simpatisan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno juga sering melakukan hal yang sama terhadap lawannya tersebut. Salah satu isu LGBT yang pernah diangkat di Twitter-nya sebagai kampanye hitam untuk menyerang pasangan calon lawan ketika masa kampanye adalah menyatakan bahwa pidato Joko Widodo yang membicarakan serial televisi *Game of Thrones* merupakan hal yang tidak pantas diucapkan karena serial televisi tersebut mengandung “adegan lesbian (LGBT)” di dalamnya. Oleh karena itu, menurutnya Joko Widodo tidak pantas untuk dipuji dengan tambahan tagar #2019GantiPresiden. *Tweet* tersebut mendapatkan 422 *retweets*, 702 *likes*, dan 523 *replies*.



Gambar 5. *Tweet* @CakKhum pada waktu kampanye pemilihan presiden (Sumber: Akun Twitter Cak Khum)

Beberapa peristiwa yang terjadi di media sosial seringkali melibatkan keberpihakan dan penggambaran buruk suatu kelompok rentan diskriminasi, salah satunya adalah kelompok LGBT. LGBT merupakan kelompok yang sudah lama mendapatkan stigma negatif dan terus menerus dipinggirkan. LGBT dianggap ‘tidak normal’ karena tidak termasuk kategori oposisi biner, yaitu sistem yang membagi dunia hanya menjadi dua kelompok yang berkaitan secara struktural. Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa hanya terdapat dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang berpasangan dengan lawan jenisnya satu sama lain. Masyarakat Indonesia memilih untuk tidak peduli bahkan cenderung mendiskriminasi orang-orang yang tidak berada dalam klasifikasi biner tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus diskriminasi kepada kelompok minoritas tersebut yang dirangkum dalam data survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Dilansir dari INFID (*International NGO Forum on*

*Indonesian Development*), terdapat tiga jenis diskriminasi yang terjadi secara besar di Indonesia hingga dilihat oleh beberapa negara lainnya, antara lain kasus pernikahan warga asing homoseksual di Bali pada tahun 2015, penyergapan pesta homoseksual di Jakarta pada tahun 2017, dan hukum cambuk di depan umum bagi pasangan homoseksual di Aceh yang juga terjadi pada tahun 2017<sup>3</sup>. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28I ayat 2, di mana disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Akan tetapi pada praktiknya, peraturan mengenai diskriminasi ini masih hanya berpihak pada kelompok dominan, yaitu kelompok yang menganut konsep oposisi biner.

Dalam wacana yang terjadi di ruang publik, termasuk di dalamnya adalah diskriminasi, bahasa memiliki peran yang penting dalam membentuk wacana tersebut. Bahasa merupakan suatu alat yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi sehingga seseorang dapat menyampaikan gagasan atau pikiran mereka dalam bentuk suatu pesan. Dalam ilmu bahasa, terdapat tataran yang meliputi bahasa seperti morfologi, fonologi, semantik, sintaksis, dan wacana (Dardjowidjojo, 2003:18). Sebagai salah satu tataran bahasa, wacana merupakan alat untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran yang berkembang pada suatu masyarakat dan dapat digunakan dalam menyampaikan informasi yang berguna. Melalui analisis kritis, seseorang dapat mengidentifikasi ideologi individu melalui tulisan atau wacana yang dibuat oleh mereka. Melalui wacana, individu menyatakan ideologi yang dianut dan secara tidak langsung memarjinalkan ideologi lainnya. Menurut Darma (2009:49), analisis wacana kritis merupakan suatu proses dalam menguraikan teks atau realitas sosial guna mendapatkan penjelasan baik yang sedang atau akan dikaji oleh seseorang maupun suatu kelompok yang memiliki kecenderungan tujuan dan keinginan tertentu. Sebagai contoh, dalam dunia politik, analisis wacana kritis digunakan dalam menganalisis praktik penggunaan bahasa tokoh atau partai politik tertentu. Terdapat beberapa macam ruang yang menyediakan gambaran umum terkait banyak hal dan informasi, salah satunya adalah media sosial, khususnya Twitter. Sebagai ruang publik atau *public sphere*, Twitter digunakan sebagai media untuk menyebarkan pendapat tentang beberapa hal. Definisi ruang publik sendiri merupakan praktik kehidupan sosial di mana pertukaran informasi mengenai sudut pandang yang berbeda menjadi pusat dari isu yang dibahas, hingga lahirnya opini publik

---

<sup>3</sup> Nindhitya Nurmalitasari, [Opini] *Diskriminasi terhadap LGBT Masih Terjadi di Indonesia*, diakses dari <https://www.infid.org/news/read/opini-diskriminasi-terhadap-lgbt-masih-terjadi-di-indonesia>, pada tanggal 19 November 2019, pukul 23.31 WIB.



(Habermas, 1989:4). Apabila opini publik ini merupakan pendapat dominan yang tidak melanggar aturan negara, maka bisa terciptakan kebijakan negara baru yang sekaligus dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat baru secara keseluruhan.

Oleh karena fenomena tersebut, peneliti mengambil cuitan akun Twitter @Gerindra tersebut sebagai objek penelitian karena mereka melakukan langkah besar yang sangat berani dan progresif, serta berlawanan dengan hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Data-data tersebut menjadi acuan penulis yang utama untuk meneliti fenomena yang terjadi di jejaring sosial *microblogging* Twitter yang dimanfaatkan partai politik sebagai medium untuk menyampaikan wacana. Meskipun banyak sekali tokoh yang terkenal sebagai pelopor analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), namun model analisis wacana kritis yang peneliti gunakan untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam pernyataan akun resmi Twitter @Gerindra tersebut adalah dengan menggunakan analisis wacana kritis model Roger Fowler.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Topik pembahasan mengenai LGBT di dalam ranah politik seharusnya dijadikan hal yang wajar karena orang-orang dari kelompok LGBT merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, selayaknya warga negara Indonesia lainnya. Selain itu, pembahasan yang edukatif dan informatif mengenai LGBT juga dapat membuka pandangan masyarakat sehingga mengurangi terjadinya diskriminasi hingga persekusi yang selama ini selalu terjadi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (2) tertulis bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, yang artinya hal itu seharusnya tidak terbatas untuk masyarakat heteroseksual saja tetapi juga untuk kelompok masyarakat lainnya, termasuk kelompok LGBT.

Namun yang terjadi, pemerintah atau pejabat publik menjadikan perbincangan mengenai LGBT selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif saja. Aktor-aktor politik menjadikan LGBT sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya, salah satunya dengan tuduhan-tuduhan. Akhirnya pembahasan mengenai LGBT hanya dijadikan kambing hitam politik dan hal tersebut berdampak buruk bagi kelompok tersebut maupun bagi masyarakat luas. Bagi masyarakat, pembahasan sisi negatif topik LGBT yang dilakukan oleh pejabat publik dapat melanggengkan *stereotype* yang telah lekat pada kelompok tersebut dan akan sulit untuk hilang. Akibatnya,

kelompok LGBT terus menerus mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang berpengaruh dan mempunyai *power* di Indonesia mencoba untuk membantu menyuarakan ketidakadilan mengenai pekerjaan terhadap kelompok LGBT. Mereka juga memiliki keberanian untuk membahas hal tersebut di ruang umum media sosial. Namun permasalahan muncul ketika pembahasan hak asasi manusia tersebut dijadikan kontroversi dan dilawan dengan wacana lainnya yang cenderung lebih dominan dan tidak berpihak kepada kelompok LGBT.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melihat penggunaan analisis wacana dalam teks yang disampaikan oleh Partai Gerindra berdasarkan tata bahasa dan kosakata Roger Fowler dan untuk melihat ideologi wacana dominan di balik topik pembahasan LGBT yang dilakukan Partai Gerindra maupun yang digunakan oleh masyarakat yang menanggapi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis wacana *tweet* yang disampaikan oleh Partai Gerindra berdasarkan tata bahasa dan kosakata Roger Fowler dan untuk mendeskripsikan ideologi wacana dominan di balik topik pembahasan LGBT yang dilakukan Partai Gerindra maupun yang digunakan oleh masyarakat yang menanggapi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Studi ini berusaha menyajikan bentuk penggunaan analisis wacana (*critical discourse analysis*) Roger Fowler dalam wacana marjinalisasi LGBT pada *tweet* partai Gerindra yang masih jarang digunakan terutama dalam konteks media Twitter dengan menggunakan teori *public sphere*. Serta untuk menyajikan ideologi wacana dominan dalam teks Twitter Partai Gerindra tentang LGBT dan juga masyarakat yang menanggapi. Penulis berharap studi ini mampu dijadikan referensi tambahan untuk penelitian yang menggunakan analisis wacana kritis model Roger Fowler, dkk, juga untuk penelitian di bidang LGBT.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan dan saran agar pemerintah lebih memperhatikan kelompok LGBT dan juga agar dibuatkan undang-undang atau regulasi yang lebih jelas dan mendetail untuk mengatur hak kelompok LGBT dan melindungi mereka dari diskriminasi atau ketidakadilan seperti yang selama ini terjadi.

#### 1.4.3 Kegunaan Sosial

Penulis berharap penelitian ini dapat dipublikasikan di jurnal nasional agar bisa bermanfaat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk berpikir lebih kritis terhadap isu-isu minoritas, serta untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap sesama manusia.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### 1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan jaring yang memuat hipotesis epistemologis, ontologis, dan metodologis para peneliti (Guba dalam Denzin & Lincoln, 2018:56). Maksudnya adalah paradigma merupakan panduan segala tindakan manusia untuk memandang dunia. Untuk para peneliti, paradigma penelitian memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian (Denzin & Lincoln, 2009: 133).

Terdapat empat paradigma, yaitu: positivisme, postpositivisme, teori kritis dan posisi ideologis terkait, dan konstruktivisme (Guba & Lincoln, 1994:105). Penulis menggunakan paradigma kritis dalam penelitian ini agar dapat melihat realitas sosial dengan cara berbeda. Menurut paradigma kritis, realitas kehidupan sosial bukan merupakan realitas yang netral, tetapi terdapat banyak pengaruh ekonomi, politik, dan sosial (Eriyanto, 2011:48). Selanjutnya Eriyanto (2011:24) juga percaya bahwa media merupakan tempat yang dapat digunakan kelompok dominan untuk mengontrol kelompok yang tidak dominan hingga bahkan memarjinalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media tersebut. Dengan demikian, tradisi kritis menjelaskan bahwa kekuasaan dan hak istimewa suatu kelompok, dan penindasan yang dilakukan satu kelompok terhadap kelompok lain adalah produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada dalam masyarakat (Morissan, 2013:55).

Selanjutnya Morissan (2013:55-56) menjelaskan bahwa paradigma kritis memiliki tiga keistimewaan pokok. Pertama, tradisi kritis berusaha memahami normal sistem yang diterima begitu saja oleh masyarakat, termasuk kekuasaan dan kepercayaan atau struktur idealis yang

mengaturinya. Kedua, teori kritis tertarik untuk menyarankan adanya bentuk penindasan sosial dan menyarankan pengaturan kekuasaan untuk membantu pembebasan dan dan mencapai masyarakat yang lebih bebas dan lengkap. Ketiga, pendukung teori kritis mencoba menggabungkan teori dan tindakan.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang bermaksud untuk menjelaskan adanya penindasan dan distribusi kekuasaan yang timpang di masyarakat (Sunarto, 2000: 455). Selain itu paradigma kritis juga digunakan untuk mencoba menunjukkan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi dan berkonflik, dan menunjukkan cara mengatasi konflik kepentingan tersebut dengan mengutamakan kepentingan kelompok marjinal. Maka, tujuan penulis menggunakan paradigma kritis dalam penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengubah dunia yang tidak seimbang, yang didominasi oleh pihak-pihak yang menindas kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

### 1.5.2 State of the Art

Setelah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian ini. Pertama merupakan penelitian dari Samantha Sinkhorn (2011) yang berjudul *Newspaper Use of Fear Appeal in Coverage of LGBT Issues* yang menyediakan situasi terbaru tentang isu LGBT di media dan penggunaan daya tarik rasa takut dalam representasi isu-isu ini di tiga surat kabar yang beredar di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menggunakan analisis isi sebagai metodenya untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait daya tarik rasa takut di surat kabar yang meliput masalah LGBT. Hasil dari penelitian ini, ketiga surat kabar terbesar yang beredar di Amerika Serikat tidak menggunakan daya tarik rasa takut ketika menangani isu-isu LGBT, tetapi cenderung menggunakan unsur ketakutan untuk menyampaikan hal yang berlawanan. Penelitian ini digunakan karena mempunyai persamaan dalam membahas LGBT dan hubungannya dengan ketakutan yang disebarkan melalui media. Tetapi terdapat perbedaan mengenai metode yaitu penelitian Sinkhorn menggunakan analisis isi, sedangkan penulis menggunakan analisis wacana kritis dalam penelitian ini. Objek penelitian juga berbeda antara surat kabar/koran dengan media baru Twitter.

Selanjutnya yaitu penelitian karya Martin Monahan (2018) yang berjudul *'Tory-normativity' and gay rights advocacy in the British Conservative Party since the 1950s* tentang advokasi hak-hak kelompok gay dalam Partai Konservatif sejak 1950-an yang mengecilkan perbedaannya dari

kepercayaan-kepercayaan Konservatif dengan menekankan pragmatisme atas emansipasi; kebijaksanaan atas perayaan; dan tanggung jawab atas hak. Peneliti kemudian menciptakan istilah 'tory-normativitas' yang dapat memperkenalkan advokasi hak-hak *gay* ke dalam partai dalam bentuk yang dapat diterima dan menjadikan partai konservatif lebih berkembang. Persamaan penelitian terdapat pada partai konservatif yang membahas mengenai hak LGBT. Tetapi terdapat perbedaan pada metode penelitian yaitu penelitian Monahan menggunakan analisis isi, sedangkan penulis menggunakan analisis wacana kritis.

Referensi penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Usrotul Afifah (2019) yang berjudul *The Role Of Media In Forming Negative Opinions Of Society Related To LGBT Community (Gay, Lesbian, Bisexual And Transgender) In Indonesia*. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial, Afifah ingin melihat bagaimana media di Indonesia merepresentasikan kelompok LGBT menggunakan stigma negatif menggunakan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa media di Indonesia selalu membahas LGBT dengan representasi negatif tanpa memikirkan dampak yang bisa disebabkan terhadap kelompok LGBT. Hampir sama dengan tema penelitian ini bahwa peneliti sama-sama ingin melihat bagaimana LGBT ditunjukkan. Tetapi alih-alih di media massa, penelitian ini lebih mengarah pada ranah politik dalam membicarakan LGBT. Kekurangan dari penelitian Afifah adalah bahwa peneliti hanya menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian ini akan dilakukan dengan analisis teks dan wawancara mendalam.

Penelitian ke empat yang akan dijadikan referensi adalah penelitian berjudul *LGBT\* People in the Speeches of Italian and British PMs: a Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis* milik Carmen Serena Santonocito. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tren saat ini dalam merepresentasi kelompok LGBT dalam pidato Perdana Menteri Inggris dan Italia dengan tujuan untuk menyelidiki bagaimana orang-orang dari kelompok LGBT dipresentasikan secara diskursif dan linguistik dalam wacana kelembagaan setiap pemimpin politik. Menggunakan pendekatan multi-disiplin dalam kerangka Studi Wacana Kritis Corpus-Assisted. Tetapi terdapat sebuah poin menarik dalam penelitian tentang sentralitas wacana homoseksualitas. Hingga sepuluh tahun yang lalu, LGBT merupakan ranah wacana minoritas yang tidak menarik perhatian sosial, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran minat pada wacana kelompok tersebut yang semakin banyak dibicarakan. Meski hanya pada level partai politik, tetapi penelitian ini memiliki persamaan yang cukup banyak karena terkait dengan bagaimana wacana LGBT dalam ranah politik.

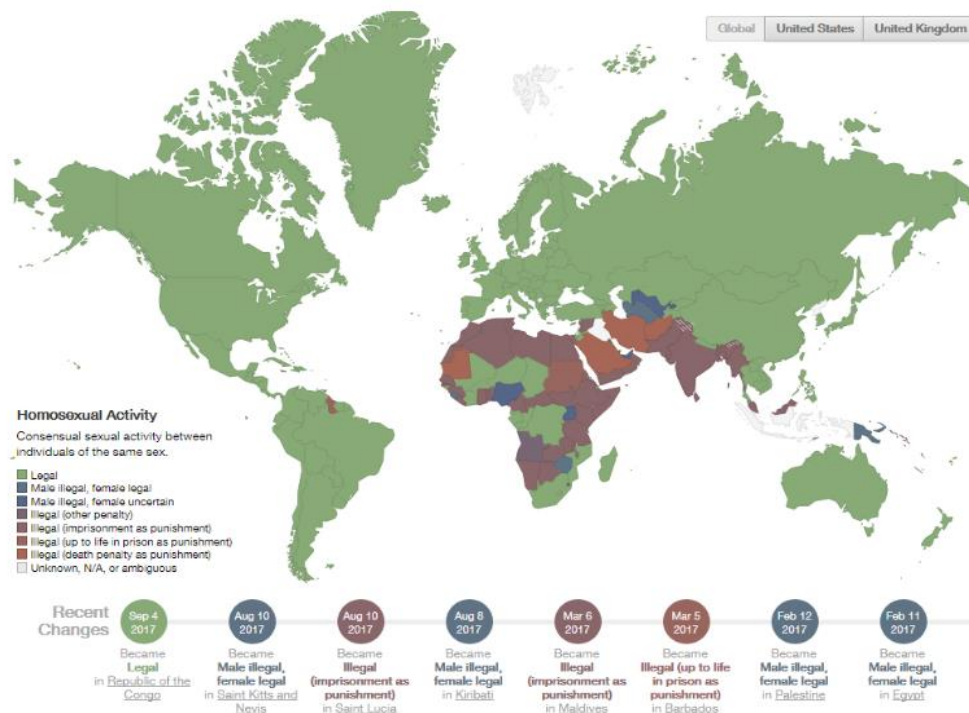
Penelitian berikutnya dari Parthiban Muniandy (2012) dengan judul *Malaysia's Coming Out! Critical Cosmopolitans, Religious Politics and Democracy* yang membahas tentang kebangkitan gerakan sosial di Malaysia, dengan fokus khusus pada transformasi dalam masyarakat sipil dan perubahan wajah politik di negara tersebut. Muniandy melihat bagaimana isu LGBT sangat dipolitisasi sebagai akibat dari kebangkitan aktivisme dan mobilisasi publik. Peneliti memeriksa wacana seputar masalah ini melalui analisis situs web LSM, siaran pers, artikel berita dan sumber lainnya. Analisis mengungkapkan tiga tema yang muncul dimulai dengan fragmentasi otoritas Islam setelah percobaan dengan Islamisme negara, kosmopolitanisasi masyarakat dalam fase paska Islam dan, meningkatnya visibilitas publik terhadap gerakan sosial dan politik. Persamaan dengan penelitian ini adalah bagaimana isu LGBT digunakan di dalam ranah politik bukan untuk membantu kelompok tersebut tetapi untuk kepentingan-kepentingan politik lainnya.

Penelitian terakhir berjudul *Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control* yang merupakan karya dari Evelyn Blackwood (2007). Penelitian ini mengkaji perubahan dalam regulasi seksualitas di Indonesia pada periode sejak 1980 yang terlihat melalui wacana aktivis negara, agama dan lesbian dan gay tentang seksualitas. Makalah ini mengkaji perubahan dalam regulasi seksualitas di Indonesia pada periode sejak 1980 yang terlihat melalui wacana aktivis negara, agama dan lesbian dan gay tentang seksualitas. Tiga era yang berbeda selama periode sejarah Indonesia dibandingkan. Di bawah rezim Orde Baru Soeharto, negara Indonesia berusaha mengendalikan seksualitas melalui penyebaran gender. Selama 1990-an, wacana Islam tentang seksualitas negara bergeser sebagai respons terhadap tekanan internasional untuk mendukung pernikahan sesama jenis dan hak-hak seksual. Selama periode ketiga setelah berakhirnya rezim Suharto pada tahun 1998, minoritas Islam konservatif mendorong adanya undang-undang yang lebih ketat dalam KUHP Negara, yang memulai debat publik yang intens tentang peran negara dalam masalah seksualitas dan moralitas. Selama periode ini, wacana dominan tentang seksualitas berubah dari hubungan strategis normatif gender dengan heteroseksualitas dan perkawinan menjadi upaya langsung untuk mengatur perkawinan heteroseksual dengan mengkriminalkan berbagai praktik seksual.

### 1.5.3 Homofobia di Indonesia

Di 131 dari total 174 negara di dunia<sup>4</sup>, kelompok LGBT dapat diterima oleh masyarakat umum. Patokan dari penerimaan ini adalah di mana orang-orang dari kelompok LGBT dipandang sebagai hal yang positif dan inklusif. Mereka mendapatkan hak hidup, hak diakui keberadaannya, hak mendapatkan pekerjaan, bahkan hak untuk menikah dengan sesama jenisnya. Namun memang masih terdapat beberapa negara yang tidak melegalkan, mengakui, dan bahkan melarang adanya kelompok LGBT.

Indonesia sendiri belum pernah secara pasti memutuskan hukum apa pun untuk kelompok rentan ini. Menurut Hutt<sup>5</sup>, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak teridentifikasi atau memiliki ambiguitas dalam hubungannya dengan hak LGBT. Indonesia juga menjadi negara di mana tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT dinormalisasi karena tidak ada perlindungan khusus untuk kelompok tersebut, sama seperti Rusia, beberapa negara di Afrika, dan mayoritas negara di Asia.



Gambar 6. Statistik Negara dengan aktivitas homoseksual

<sup>4</sup> Andrew R. Flores, *Social Acceptance of LGBT People in 174 Countries: 1981 to 2017*, diakses dari <https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Global-Acceptance-Index-LGBT-Oct-2019.pdf>, pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 19.59 WIB.

<sup>5</sup> Rosamond Hutt, *This is The State of LGBTI Rights Around The World in 2018*, diakses dari <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/lgbti-rights-around-the-world-in-2018/>, pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 20.53 WIB.

(Sumber: <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/lgbt-rights-around-the-world-in-2018/>)

Sedangkan menurut data dari *Pew Research Center* dalam surveinya yang dilakukan pada tahun 2019<sup>6</sup>, hanya 9% masyarakat Indonesia menyetujui dan menerima homoseksualitas.

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (dalam *UN High Commission for Human Rights*, 2011:3) melaporkan bahwa,

*“In all regions, people experience violence and discrimination because of their sexual orientation or gender identity.... Violations include – but are not limited to – killings, rape and physical attacks, torture, arbitrary detention, the denial of rights to assembly, expression and information, and discrimination in employment, health and education.”*

Hal tersebut membuktikan bahwa PBB telah dengan tegas mengecam negara-negara yang melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Tetapi sayangnya tidak ada aksi atau pun hukuman untuk negara-negara yang melanggarnya tersebut.

Gagasan pertama tentang konsep hak asasi manusia dimulai dengan keyakinan bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki hak yang sama, tanpa memandang agama, etnis, jenis kelamin, ras, kelas sosial, atau orientasi seksualnya (Ali, 2013:5). Lebih lanjut Ali (2013:6) menyatakan diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena mereka berasal dari identitas sosial yang berbeda (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Berangkat dari situ terdapat istilah sendiri yang merangkum perilaku dan perasaan negatif dan cenderung membenci homoseksualitas atau orang-orang yang dianggap sebagai LGBT, yaitu dinamakan homofobia.

Indonesia merupakan salah satu negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sejak 28 September 1950. Komitmen yang telah dibuat oleh Negara-negara anggota PBB sejak berdiri pada tahun 1945 yaitu antara lain mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan pembangunan sosial, meningkatkan standar kehidupan yang layak, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, dan Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup peran PBB juga mencakup beberapa di antaranya yaitu mempromosikan sistem demokrasi,

---

<sup>6</sup> Jacob Poushter dan Nicholas Kent, *The Global Divide on Homosexuality Persists*, diakses dari <https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/>, pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 20.12 WIB.



kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta hak asasi manusia<sup>7</sup>. Tetapi perlakuan diskriminatif Indonesia terhadap kelompok LGBT tetap langgeng.

Seperti halnya kelompok terpinggirkan lainnya, kelompok LGBT mengalami penyangkalan, kekerasan, dan diskriminasi di berbagai bidang, termasuk pekerjaan, sekolah, layanan medis, dan hak asasi mereka (Papilaya, 2016:27). PEW *Research Center* 2013 membeberkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penerimaan terhadap homoseksualitas yang paling rendah<sup>8</sup>.

Wacana mengenai LGBT mulai marak diperbincangkan sejak awal tahun 2016, ketika sebuah media berita daring menuliskan bahwa SGRC-UI (*Support Group and Resources Center on Sexuality* Universitas Indonesia) sebagai “Organisasi atau komunitas bagi kalangan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di kalangan mahasiswa, mahasiswi, dan para dosen” karena poster tentang informasi LGBT *Peer Support Network* yang diselenggarakan bersama Melela.org tersebar di media sosial hingga aplikasi chat. Karena dituduh berasosiasi dengan SGRC untuk mempromosikan LGBT, Universitas Indonesia memberi pernyataan tegas mengenai ketidakterlibatannya dengan *support group* tersebut. Karena ramainya pemberitaan tentang hal tersebut, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) kala itu, M. Nasir, mengatakan bahwa LGBT tidak diijinkan masuk kampus karena dapat merusak moral bangsa.

Kelompok LGBT cenderung dieksploitasi keberadaannya untuk dibuatkan pemberitaan di media arus utama agar terkesan sensasional dan dimanfaatkan sebagai *clickbait* yang mengundang masyarakat untuk mengunjungi berita tersebut. Hingga kini, kelompok LGBT lebih banyak menjadi konsumen berita yang tidak memiliki kuasa atas pemberitaan mengenai dirinya (Nugroho dalam Indari & Novianti, 2018:2).

Mulai saat itu banyak pejabat negara yang mulai membicarakan dan menganjurkan bahwa LGBT harus ditolak karena tidak ada ruang untuk kelompok tersebut dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bahkan salah satu ormas agama sempat beberapa kali melakukan penyisiran sejumlah indekos di Bandung untuk mencari pasangan *gay* dan lesbian yang dianggap meresahkan masyarakat. Pada Januari 2018, ada berita mengenai penangkapan 12 waria di Aceh,

---

<sup>7</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Daftar Kerja Sama Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*, diakses dari [https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb), pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 21.07 WIB.

<sup>8</sup> Arlian Buana, *SGRC-UI dan Penghakiman terhadap LGBT*, diakses dari <https://tirto.id/sgrc-ui-dan-penghakiman-terhadap-lgbt-ev>, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 00.18 WIB.

kemudian pada April 2018 terdapat berita “Pria Gay di Cawang Dibunuh dengan Sangkur Pinjaman”, ada juga pembubaran paksa dalam acara *screening* film “Kucumbu Tubuh Indahku” di Bandar Lampung, serta pembubaran diskusi LGBT di ITB Bandung, hingga diskriminasi yang dilakukan oleh institusi seperti Menristek yang melarang LGBT masuk kampus, juga larangan Kejaksaan Agung terhadap kelompok LGBT yang melamar menjadi CPNS.

Diskriminasi yang merupakan salah satu bentuk nyata homofobia ini diduga masih sering terjadi di Indonesia karena LGBT masih dianggap sebagai penyakit penyimpangan kejiwaan yang bisa menular. Padahal homoseksualitas sebagai gangguan jiwa telah dihapus dari daftar Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada 1993. Sebelumnya pada tahun 1990, WHO mengumumkan bahwa homoseksualitas juga telah dihilangkan dari daftar gangguan jiwa dalam *International Classification of Diseases (ICD)* edisi 10.

#### 1.5.4 Twitter sebagai Ruang Publik Virtual

Perkembangan media sudah tidak dapat dipungkiri masuk ke semua aspek kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari setiap individu. Media baru memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari televisi kabel, satelit, teknologi optik fiber, dan komputer. Marshall McLuhan telah memprediksikan masa depan dengan tulisannya tentang *Technological Determinism* pada tahun 1964, yang menyatakan bahwa kehadiran teknologi tentunya dapat memengaruhi kondisi sosial manusia. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai bentuk komunikasi merupakan agen membentuk pemikiran, perilaku, dan transisi kehidupan masyarakat ke abad teknologi berikutnya (Nurudin, 2007:184).

Prediksi McLuhan juga semakin didukung oleh kehadiran media sosial. Media sosial memfasilitasi kita untuk mampu mengetahui segala macam informasi atau fenomena yang sedang terjadi di dunia. Media sosial adalah teknologi yang digunakan secara efektif untuk berkomunikasi, membangun hubungan, dan membangun kepercayaan dengan orang lain (Safko, 2010:5). Situs jejaring sosial atau media sosial seperti Twitter awalnya merupakan tempat untuk “berkumpul”nya orang-orang dari berbagai belahan dunia agar dapat bertukar informasi hingga menciptakan interaksi antar pengguna. Namun sekarang Twitter telah berkembang, bukan hanya dimanfaatkan oleh individu biasa tetapi juga dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk menyampaikan kepentingannya.

Konsep ruang publik yang pertama kali diperkenalkan oleh Jürgen Habermas dalam bukunya berjudul *Strukturwandel der Öffentlichkeit* (1962), yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989), masih terus menjadi model yang berpengaruh dalam pemahaman media dan proses komunikasi, terutama di bidang politik. Penjelarasannya tentang konsep ruang publik (*public sphere*) yaitu merupakan elemen yang sangat penting untuk masyarakat demokrasi. Habermas memahami ruang publik sebagai ruang yang dibingkai dan terstruktur oleh operasi media massa (terutama cetak dan siaran), dan di mana "komunikasi politik yang dimediasi" dengan demikian "dijalankan oleh elit" (Habermas dalam Bruns & Highfield, 2014:99). Baginya, ruang publik lokal bukanlah ruang lokal yang lemah, melainkan tempat bertemunya berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda (Arditama, 2016:69). Habermas menjelaskan modernitas dengan segala permasalahannya, termasuk kritik terhadap dominasi idealis dan dominasi rasio instrumental.

Habermas menjelaskan fungsi ruang publik (dalam Sumaryanto, 2008:3), yaitu:

1. Ruang publik merupakan tempat perjuangan melawan tekanan kekuasaan.
2. Memiliki unsur aksesibilitas, kesamarataan, independensi, dan diskursus.
3. Transformasi ruang publik borjuis terjadi distorsi, refeodalisasi, dan pembusukan.

Habermas juga pernah mengungkapkan dua tema pokok yang diyakininya, yaitu pertama, analisisnya tentang asal-usul sektor publik borjuis; kedua, perubahan struktural dalam ruang publik modern yang ditandai dengan kebangkitan kapitalisme, industri kebudayaan, dan semakin kuatnya posisi organisasi yang beroperasi dalam ekonomi dan perusahaan komersial besar dalam kehidupan publik. Dalam analisis ke dua, organisasi ekonomi dan pemerintah mengambil alih ruang publik, sedangkan masyarakat biasa cukup senang menjadi konsumen barang, jasa, administrasi politik, dan tontonan publik (Habermas, 1991:3).

Inti dari konsepsi Habermas tentang ruang publik 'ideal' adalah bahwa melalui wacana aktif dan rasional tentang masalah-masalah kepedulian politik, opini publik akan dihasilkan dan pendapat itu akan membentuk kebijakan pemerintah (Dunn, 2014:8). Maksudnya adalah bahwa menurutnya, ruang publik yang ideal adalah ketika masyarakat yang terlibat dapat memiliki pengaruh langsung pada cara kerja lembaga legislatif. Pada awalnya, Habermas tidak ingin mengkategorikan media massa sebagai salah satu bentuk ruang publik karena media massa dapat memotong-motong diskusi dan pandangan. Namun pada akhirnya media massa dikategorikan

sebagai ruang publik karena dengan publik yang besar, maka media massa dibutuhkan untuk penyebarannya.

Penelitian Nielsen menunjukkan bahwa paling tidak, media sosial telah menjadi tempat umum, tempat bertemunya beragam pendapat dapat menciptakan opini publik. Begitu juga dengan Twitter yang menciptakan bentuk ruang publik yang tidak ada di dunia nyata. Karena Twitter masih memenuhi persyaratan sebagai ruang publik ideal, yaitu akses terbuka, wacana rasional-kritis, demokrasi deliberatif, dan generasi opini publik yang terinformasi (O'Hallarn, 2016:6-7). Tetapi ada juga penelitian lain (Liu & Weber, 2014:336) yang mengatakan bahwa Twitter bukan merupakan ruang publik ideal untuk percakapan demokratis karena dampak hierarkinya. Namun menurut Hardiman (dalam Kurniawati, 2018:335), ruang publik tidak merupakan suatu ruang fisik, tetapi suatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif.

Mungkin kesamaan terbesar yang dapat ditarik antara ruang publik Habermas (1989) dan Twitter adalah, meskipun media dapat menggunakan platform tersebut, pengguna Twitter dapat melewati media saat mengekspresikan ide dan pendapat (Smith, 2019:35).

Tetapi konsep ideal Habermas bahwa ruang publik seharusnya gratis dan memiliki akses terbuka, belum bisa terwujud dalam demokrasi yang seharusnya tanpa dominasi ini. Dominasi kepentingan kelas borjuis menjadikan ruang publik memiliki penghalang untuk benar-benar dapat diakses, tidak dibatasi, wacana rasional-kritis (O'Hallarn, 2016:85).

Hal ini terjadi juga pada Twitter yang perkembangannya secara pesat sebagai media sosial dapat berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi dan berbagi informasi, dimanfaatkan oleh banyak institusi pemerintah sebagai bentuk wadah komunikasi dialogis antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sebagai ruang publik virtual, Twitter memiliki kerangka yang meliputi penguasaan sumber-sumber terdahulu, inklusivitas atau keikutsertaa, kebebasan, dan desain, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wilhelm (dalam Kurniawati, 2018:337).

Twitter sebagai ruang publik virtual dijadikan media pemerintah untuk melakukan publikasi-publikasi positif sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta sebagai tempat membangun citra yang baik di mata masyarakat. Interaksi masyarakat dalam ruang publik virtual yang menyuarakan perhatian mereka, dan dengan demikian mereka berharap untuk memengaruhi pemerintah atau pelaku politik lainnya (Wilhelm dalam Kurniawati, 2018:342).

Di satu sisi, pemikiran bahwa pemerintah atau pejabat publik dapat berdialog dengan publik, tanpa manipulasi media, tampak inovatif dan progresif. Di sisi lain, jika hal tersebut digunakan untuk menyebarkan kebohongan, itu tidak meningkatkan wacana dan malah dapat membuat lebih banyak masalah (Smith, 2019:36). Twitter dimanfaatkan oleh pemerintah atau pejabat publik sebagai media atau tempat untuk mengetes suatu wacana untuk mengetahui reaksi yang mengikuti wacana tersebut. Seringnya, Twitter yang seharusnya merupakan media dua arah tempat untuk berdiskusi, hanya dijadikan media *broadcast* informasi satu arah yang merupakan kepentingan pemerintah atau pejabat publik demi menyampaikan ideologinya.

#### 1.5.5 Wacana Marjinalisasi

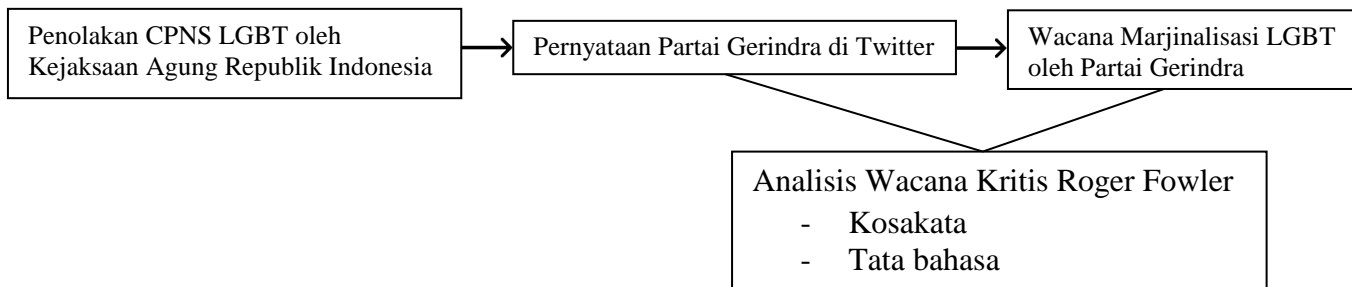
Seperti yang dikatakan Eriyanto (2011:34), terdapat beberapa karakteristik analisis wacana kritis. Pertama, tindakan. Artinya adalah wacana dipahami sebagai suatu tindakan yang dianggap disengaja, seperti memengaruhi, berdebat, membujuk, membela, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, konteks. Ini berarti bahwa konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi harus dipertimbangkan. Ketiga, historis. Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu dan tidak dapat dipahami tanpa konteks yang menyertainya. Keempat, kekuasaan. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau bentuk lainnya dipandang sebagai bentuk perebutan kekuasaan. Dan terakhir, ideologi. Hal ini merupakan inti dari analisis wacana kritis karena teks, percakapan, dan sejenisnya adalah bentuk praktik idealis atau refleksi dari idealisme tertentu.

Menurut Tony Bennet (Eriyanto, 2011:36), pandangan kritis menempatkan media massa sebagai saluran yang tidak berharga, karena media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Media berpihak pada kelompok dominan untuk menyebarkan ideologinya, mengontrol pihak lain, dan membentuk konsensus antaranggota kelompok. Media juga dipandang sebagai ekspresi perjuangan ideologis antar kelompok dalam masyarakat. Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew menggunakan *critical linguistics* untuk melihat bahasa sebagai praktik sosial di mana kelompok membangun dan menyebarkan ideologi mereka. Sama seperti van Dijk dan Fairclough, Fowler dkk. juga ingin mengklarifikasi bagaimana media membentuk opini publik dengan menggunakan kekuatannya dengan mengamati kosakata dan tata bahasa yang digunakan dalam teks bersangkutan.

Fowler dkk. menciptakan model analisisnya berdasarkan deskripsi Halliday tentang struktur dan fungsi bahasa. Elemen-elemen ini membentuk dasar dari struktur gramatikal yang menyediakan sarana di mana tata bahasa dikomunikasikan kepada khalayak. Kosakata dan tata bahasa juga dapat memiliki implikasi dan ideologi tertentu.

Karena Fowler percaya bahwa tata bahasa dan praktik pemakaiannya bukan hanya sekedar bahasa yang dipakai sehari-hari, melainkan digunakan untuk menyampaikan ideologi tertentu kepada khalayak atau orang lain. Ini membuktikan bahwa Fowler juga memberi perhatian besar terhadap kelompok marjinal atau kelompok yang dirugikan. Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian. Pertama, pada level kata. Menggambarkan melalui bahasa, peristiwa dan aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Maksud bahasa bukan hanya sebagai penanda atau identitas tetapi juga dihubungkan dengan ideologi tertentu, makna apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum. Pihak atau kelompok mana yang akan diuntungkan dari penggunaan istilah tersebut, dan pihak atau kelompok mana yang dirugikan dan diasingkan dari posisinya. Kedua, dari perspektif kata atau kalimat. Susunan kata-kata dalam bentuk kalimat tertentu dipahami tidak hanya sebagai teknik linguistik, tetapi juga sebagai praktik linguistik.

### 1.5.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 7. Kerangka Pemikiran Penelitian

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Selama ini masyarakat beranggapa bahwa pembahasan mengenai LGBT tidak layak dibicarakan karena bukan sesuatu yang normal menurut masyarakat. Karenanya orang-orang yang termasuk dalam kelompok tersebut merasa tidak mempunyai ruang aman untuk sekedar membicarakan tentang orientasi seksualnya. Apalagi dalam dunia politik di Indonesia, membahas mengenai LGBT adalah sesuatu yang tabu. Mereka memilih untuk tidak membicarakannya dan menutup mata akan isu tersebut. Maka yang terjadi adalah orang-orang dari kelompok LGBT pun merasa

tidak terwakili dalam pemerintahan dan tidak akan ada peraturan atau kebijakan yang berpihak kepada mereka.

Munculnya kembali isu LGBT yang diungkapkan oleh partai dengan jumlah kursi nomor dua paling banyak di DPR adalah sesuatu yang cukup kontroversial. Mengingat partai tersebut sering terafiliasi dengan gerakan-gerakan agama yang bersifat radikal. Hal ini karena LGBT merupakan isu yang sangat sensitif dan selalu dikaitkan dengan agama.

Septian & Nugraha mengatakan bahwa isu LGBT dilihat sebagai sebuah komoditas dengan muatan politik yang besar<sup>9</sup>. Hal ini terbukti salah satunya dengan digunakannya isu tersebut untuk merebut hati masyarakat dalam pemilihan presiden tahun ini.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan gaya penulisan kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis yang dimiliki oleh Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew (Eriyanto, 2011:133). Dengan memilih kosakata dan tata bahasa dari sudut pandang linguistik kritis yang menjadi fokus Fowler, dkk. Hal ini memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana peristiwa dan aktor disajikan dalam teks dan menghilangkan misrepresentasi dan diskriminasi.

Penggunaan bahasa dan kosakata dalam sebuah teks dianalisis untuk mengetahui adanya sikap yang memojokkan pihak lain sehingga timbul pendapat dari berbagai versi yang berbeda-beda dalam memenangkan opini publik adalah salah satu ciri penggunaan teori Fowler, dkk.

Pendekatan yang dilakukan oleh Roger Fowler, dkk. dikenal sebagai *critical linguistics* yang dipandang sebagai praktik sosial, di mana suatu kelompok membangun dan menyebarkan ideologinya. Model teori Fowler, dkk. dibagi menjadi dua yakni aspek kosakata dan aspek tata bahasa. Dalam analisis wacana, analisis penggunaan kosakata yakni penggunaan kosakata yang bermakna penghalusan, sedangkan dalam tata bahasa yaitu adanya penggunaan kalimat aktif-pasif dan kalimat nominal-verbal.

Aspek kosakata tersebut dibagi menjadi empat (dalam Eriyanto, 2011: 135-149), yaitu: (1) kosakata: membuat klasifikasi, yaitu adalah penyederhanaan dan abstraksi dari sebuah realitas dalam teks yang dilakukan oleh pembuat teks agar pembaca mengerti bahwa teks tersebut sedang

---

<sup>9</sup> A. Septian, Nugraha C., Imran, *Nasib Wadam di Tahun Politik*, <https://majalah.tempo.co/read/154873/nasib-wadam-di-tahun-politik>, pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 01.11 WIB.

mengklasifikasi kosakata; (2) kosakata: membatasi pandangan, yaitu adalah ketika pembaca diajak untuk berpikir dan memahami teks seperti yang diinginkan oleh pembuat teks; (3) kosakata: pertarungan wacana, adalah pertarungan sebuah wacana di mana masing-masing pihak mempunyai versi atau pendapat sendiri-sendiri atas suatu masalah; dan (4) kosakata: marjinalisasi, di mana pilihan linguistik tertentu membawa nilai ideologis tertentu yang merupakan upaya untuk membentuk opini publik, memverifikasi, dan membenarkan 1 (satu) pihak dan menghilangkan pihak lain. Sedangkan aspek tata bahasa dibagi menjadi dua (dalam Eriyanto, 2011: 156-162), yaitu: (1) efek bentuk kalimat pasif: penghilangan pelaku, adalah sebuah kalimat pasif yang menjadikan sasaran atau korban sebagai sentral dalam kalimat, dan menghilangkan pelaku; (2) efek nominalisasi: penghilangan pelaku, yaitu penghilangan pelaku dengan mengubah kalimat verbal menjadi kalimat nominal yang menekankan bukan pada tindakan atau kegiatan melainkan pada suatu peristiwa.

Analisis wacana kritis dipilih untuk penelitian ini untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks melalui bahasa. Analisis wacana kritis model ini menekankan pada kelompok kekuatan yang terjadi dalam proses produksi dan reproduksi makna (Eriyanto, 2011:6). Karenanya, analisis ini bisa untuk membongkar kuasa yang terdapa pada semua proses bahasa. Hal yang membedakan analisis wacana kritis secara umum dengan pendekatan bahasa yang lain adalah karena memfokuskan investigasi utama pada praktik wacana yang disampaikan melalui bahasa (Wodak & Meyer, 2001:2). Oleh karena itu, wacana melihat bahasa selalu berhubungan dengan kekuasaan, khususnya dalam membentuk sebuah subjek, serta berbagai representasi yang dimiliki masyarakat (Hikam dalam Eriyanto, 2011:6).

Analisis wacana kritis memiliki minat khusus pada hubungan antara bahasa dan kekuasaan (Eriyanto, 2011:7). Analisis wacana kritis berhubungan secara mendasar dengan menganalisis hubungan struktural yang terlihat dari dominasi, diskriminasi, kekuasaan dan kontrol sebagaimana seperti pada bahasa. Wodak dan Meyer (2001:20) selanjutnya menjelaskan bahwa ini berarti analisis wacana kritis bertujuan untuk menyelidiki ketimpangan sosial secara kritis sebagaimana diekspresikan, diisyaratkan, dikonstitusikan, dilegitimasi dan sebagainya oleh penggunaan bahasa (atau dalam wacana).

Terdapat lima karakteristik penting menurut Teun A. van Dijk, Norman Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto, 2011:8-14). Pertama adalah tindakan (*action*), di mana wacana sama dengan tindakan. Wacana dianggap memiliki tujuan, seperti persuasi, argumentasi, kontra



argumen, dan sebagainya. Wacana juga dipahami sebagai ekspresi sadar. Karakteristik kedua adalah konteks (*context*), yang memperhatikan konteks wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Sedangkan karakteristik ketiga adalah historis (*historical*). Salah satu aspek penting dalam memahami sebuah teks adalah dengan melihat aspek historis di mana teks diciptakan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan unsur kekuasaan (*power*) dalam ciri-cirinya. Semua wacana yang muncul dipandang sebagai bentuk perebutan kekuasaan, bukan sebagai sesuatu yang natural. Karakteristik terakhir adalah ideologi (*ideology*). Teks, percakapan, dan lainnya adalah praktik ideologi atau refleksi dari ideologi tertentu.

Sejak awal, analisis wacana kritis telah diposisikan sebagai pendekatan yang menarik, misalnya, dalam kelompok-kelompok yang terdiskriminasi secara sosial. Wodak dan Meyer (2001:20) menerangkan bahwa asumsi analisis wacana kritis semua wacana bersifat *historical* dan bisa dipahami dengan cara mereferensikan pada konteksnya. Karena karakteristik-karakteristik tersebut, peneliti memutuskan menggunakan pendekatan ini sebagai metode untuk penelitian ini, karena fokus penelitian kepada partai politik yang menggunakan isu sensitif kelompok marjinal, yaitu LGBT. Juga karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan ideologi menurut teori Roger Fowler dalam teks yang disampaikan oleh Partai Gerindra.

### 1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu *tweet* yang diambil dari akun Twitter @Gerindra. Unit observasi adalah semua *tweet* @Gerindra yang membahas tentang ketidaksetujuannya terhadap Kejaksaan Agung yang diunggah pada tanggal 28 November 2019 mengenai penolakan pelamar CPNS oleh orang-orang yang memiliki orientasi yang berbeda, serta tanggapan dan konfirmasinya.

### 1.7.3 Jenis Data

Moleong (2007:157) mengungkapkan bahwa jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Penelitian ini menggunakan data berupa teks kata-kata pada *tweet* akun resmi @Gerindra.

#### 1.7.4 Sumber Data

##### 1.7.4.1 Data Primer

Data utama diperoleh secara langsung pada akun resmi media sosial Twitter @Gerindra.

##### 1.7.4.2 Data Sekunder

Perolehan data sekunder mencakup referensi penunjang berupa buku cetak maupun e-book, jurnal penelitian, artikel di internet yang berhubungan dengan penelitian ini, serta referensi-referensi lainnya.

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks dan studi literatur. Data yang berupa teks didapatkan dari akun media sosial Twitter @Gerindra.

#### 1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menggunakan analisis wacana kritis Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew sebagai teknik analisis data, yang selanjutnya akan ditulis sebagai Fowler, dkk. *Critical linguistics* yang mereka kembangkan datang dari teori linguistik yang dibuat oleh beberapa peneliti yang menganalisis bagaimana tata bahasa dan pilihan kosakata tertentu dapat menyebabkan implikasi dan ideologi tertentu. Berdasarkan teori Halliday tentang struktur dan fungsi bahasa, Fowler, dkk. berfokus pada aspek kosakata dan tata bahasa bagi yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat luas. Di bawah ini disajikan model analisis wacana teoritis dari Roger Fowler, dkk. yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

##### 1.7.6.1 Aspek Kosakata

Fowler, dkk. melihat bahasa sebagai sistem klasifikasi. Bahasa menjelaskan seperti apa realitas dunia dilihat serta memberi seseorang kemampuan untuk mengontrol dan mengatur pengalaman realitas sosial. Namun, sistem klasifikasi tergantung pada satu pihak dengan pihak lain. Pengalaman budaya, sosial, dan politik berbeda satu sama lain. Bahkan Fowler, dkk. dapat melihat pengalaman-pengalaman tersebut hanya dari bahasa yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertarungan sosial terjadi. Pentingnya klasifikasi ini dapat dilihat dari cara peristiwa yang sama dapat dibahas menggunakan bahasa yang berbeda. Perbedaannya tidak dilihat sebagai

murni teknis, tetapi sebagai praktik ideologi tertentu. Bahasa yang berbeda menciptakan realitas yang berbeda ketika diterima oleh masyarakat. Bahasa sebagai sarana masyarakat memahami realitas ini.

Terdapat 4 (empat) macam penggunaan aspek kosakata dalam teori Fowler, dkk., yaitu kosakata: membuat klasifikasi, kosakata: membatasi pandangan, kosakata: pertarungan wacana, dan kosakata: marjinalisasi. Karena teori Roger Fowler, dkk. fokus pada penggunaan kosakata dan tata bahasa dalam suatu teks, maka sumber data hanya dilakukan dengan analisis pada teks yang akan diteliti, yaitu *tweet* dari akun resmi @Gerindra. Dalam penelitian ini, teks berupa *tweet* yang ditulis oleh akun @Gerindra dipilih peneliti karena ‘ocehan’ tersebut belum lama ini ramai dan menimbulkan kontroversi secara mengejutkan karena Partai Gerindra melalui Twitter-nya dengan berani mendobrak normativitas di mana mereka memberi dukungannya terhadap kelompok LGBT.

#### 1.7.6.1.1 Analisis Kosakata: Membuat Klasifikasi

Klasifikasi kosakata adalah cara terbaik untuk menyederhanakan realitas yang kompleks agar publik paham bahwa pembuat teks sedang mengklasifikasi kosakata ketika teks dikomunikasikan ke khalayak. Maka teks Twitter dari Partai Gerindra tersebut akan dianalisis dengan mencari tahu bagaimana klasifikasi pada tiap *tweet* yang berhubungan dilakukan.

#### 1.7.6.1.2 Analisis Kosakata: Membatasi Pandangan

Kosakata memengaruhi cara kita memahami dan menafsirkan peristiwa. Itu karena khalayak tidak secara langsung mengalami atau mengikuti peristiwa tersebut. Maka dari itu, ketika pembaca membaca kosakata tertentu, itu dikaitkan dengan realitas tertentu. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kosakata membatasi pandangan membatasi pandangan kita ketika menafsirkan suatu peristiwa. Maka teks Twitter dari Partai Gerindra tersebut akan dianalisis dengan mencari tahu kalimat-kalimat pada tiap *tweet* yang mengandung kosakata yang membatasi pandangan pembaca atau khalayak.

#### 1.7.6.1.3 Analisis Kosakata: Pertarungan Wacana

Setiap pihak memiliki versi atau pendapatnya sendiri tentang peristiwa dalam suatu teks. Mereka mengklaim kebenaran berdasarkan pembenaran dan penjelasan tentang peristiwa tersebut. Bukan

hanya versi pendapat yang berbeda, pihak-pihak tersebut juga ingin versi mereka dianggap yang terbaik yang dapat memengaruhi opini public. Dapat disimpulkan bahwa kosakata pertarungan wacana adalah pertarungan dalam wacana di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda untuk memenangkan opini publik. Maka teks Twitter dari Partai Gerindra tersebut akan dianalisis dengan mengamati kalimat-kalimat pada *tweet* yang mengandung pertarungan wacana.

#### 1.7.6.1.4 Analisis Kosakata: Marjinalisasi

Kosakata tidak lah netral, tetapi memiliki sejumlah implikasi ideologi tertentu, seperti upaya membentuk opini publik, menegaskan, dan membenarkan satu pihak dan mengesampingkan yang lain. Aktor atau peristiwa yang digambarkan dengan kosakata di dalam teks dapat menimbulkan marjinalisasi yang memengaruhi makna tersebut ketika diterima oleh publik (Eriyanto, 2011:149-150). Simpulan berdasarkan uraian di atas adalah bahwa kosakata marjinalisasi adalah kata yang menggambarkan subjek teks dipinggirkan oleh pihak lain dalam konstruksi wacana. Maka teks Twitter dari Partai Gerindra tersebut akan dianalisis dengan melihat kalimat-kalimat pada *tweet* yang sekiranya mengandung marjinalisasi terhadap pihak lain.

#### 1.7.6.2 Aspek Tata Bahasa

Roger Fowler, dkk. (dalam Eriyanto, 2011:152) melihat bahasa sebagai seperangkat kategori dan proses. Kategori penting yang disebut sebagai “model” mewakili hubungan antara objek dengan peristiwa. Ada tiga model yang disampaikan oleh Fowler, dkk. Pertama, model transitif terkait dengan proses, yakni penyebab dan akibat suatu tindakan dari bahasa tersebut. Kedua, model intransitif di mana aktor dikaitkan dengan proses tanpa menjelaskan atau menggambarkan efek atau objek yang menjadi korban. Ketiga, model reasional menjelaskan hubungan antara dua entitas. Ketiga model di atas disebut sebagai model sintagmatik. Terdapat 2 (dua) penggunaan aspek tata bahasa milik Fowler, dkk., yaitu efek kalimat pasif: penghilangan pelaku dan efek nominalisasi: penghilangan pelaku.

#### 1.7.6.2.1 Analisis Efek Kalimat Pasif: Penghilangan Pelaku

Ada dua bentuk kalimat, yaitu aktif dan pasif. Kalimat aktif berfokus pada kegiatan aktor. Sedangkan kalimat pasif berfokus pada sasaran atau objek dari pelaku atau peristiwa tersebut. Sedangkan kalimat pasif berfokus pada sasaran atau korban, maka ada atau tidaknya pelaku tidak memengaruhi pembacaan kalimat. Menurut Darma (dalam Manggiasih, 2015:25-25), aktif-pasif hanyalah persoalan *voice*, yakni bagaimana hubungan antara kata kerja dan kata benda diekspresikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengaruh efek bentuk kalimat pasif penghilangan pelaku adalah kalimat berstruktur pasif yang fokus pada sasaran atau korban dan pelaku hanya sebagai tambahan keterangan. Maka teks Twitter dari Partai Gerindra tersebut akan dianalisis dengan melihat kalimat-kalimat pasif pada *tweet* yang bersifat menghilangkan pelaku.

#### 1.7.6.2.2 Analisis Efek Nominalisasi: Penghilangan Pelaku

Nominalisasi adalah proses gramatikal mengubah verba atau adjektif menjadi nomina atau kata benda (Darma dalam Manggiasih, 2015:27). Nominalisasi menekankan pada peristiwa yang terjadi, sehingga subjek bahkan objek dapat dihilangkan dan tidak memengaruhi kalimat. Berdasarkan penjelasan tersebut, kesimpulannya adalah efek nominalisasi penghilangan pelaku merupakan kalimat nomina yang menekankan pada peristiwanya. Maka teks Twitter dari Partai Gerindra tersebut akan dianalisis dengan melihat kalimat-kalimat nomina pada *tweet* yang bersifat menghilangkan pelaku.

#### 1.7.7 Kualitas Data

Kriteria yang digunakan dalam paradigma kritis adalah: (1) pemberian konteks historis (sejauh mana penelitian memperhatikan konteks latar belakang historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik); (2) pengikisan kebodohan/ ketidaktahuan/ kedunguan dan salah pengertian; serta (3) merangsang tindakan (Guba & Lincoln, 1994:110).

Menggunakan konteks historis, studi ini mengedepankan wacana marjinalisasi terhadap kelompok LGBT dalam konteks politik di Indonesia. Analisis wacana kritis Roger Fowler, dkk. merupakan metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan wacana melalui kosakata dan tata bahasa dari *tweet* yang diunggah oleh akun Twitter @Gerindra dalam hubungannya dengan LGBT.